

## **BAB II**

### **OKI SEBAGAI REPRESENTATIF UMAT MUSLIM DUNIA**

#### **A. Sejarah OKI**

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang bersifat antarpemerintahan, organisasi ini merupakan organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-bangsa dengan beranggotakan 57 negara.<sup>1</sup> tersebar lebih dari empat benua. ini adalah suara kolektif dunia Muslim. Organisasi ini berupaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian internasional dan harmoni antara berbagai orang di dunia. Sebelumnya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dikenal sebagai Organisasi Konferensi Islam dengan balutan Ideologi religius yang kuat sehingga menjadi pembeda yang kontras dengan organisasi lainnya.

---

<sup>1</sup> Afghanistan, Aljazair, Chad, Guinea, Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Mesir, Niger, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Senegal, Sudan, Somalia, Tunisia, Turki, Yaman, Yordania, Bahrain, Oman, Qatar, Suriah, UAE, Sierra Leone, Bangladesh, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Uganda, Burkina Faso, Kamerun, Komoro, Irak, Maladewa, Djibouti, Benin, Brunei, Nigeria, Azerbaijan, Albania, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, Mozambik, Kazakhstan, Uzbekistan, Suriname, Togo, Guyana, Pantai Gading

Organisasi ini didirikan berdasarkan keputusan KTT sejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijra (25 September 1969) setelah pembakaran kriminal dari Masjid Al-Aqsa di pendudukan Yerusalem. OKI sendiri memiliki prinsip Organisasi yang pada dasarnya untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara-negara terutama negara Muslim.<sup>2</sup> Secara umum sejarah terbentuknya OKI adalah sebagai berikut.<sup>3</sup> Pada kisaran Tahun 1964 diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah Internasional. Setelah itu untuk melanjutkan atau mewujudkan ide yang sudah di konfrensikan di Mogadishu dilanjutkan pada tahun 1965 dengan diselenggarakannya Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam dari zionisme khususnya. Tidak berhenti disini setelah itu pada tahun 1967 terjadi momen Pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Oleh karenanya solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah makin meningkat, yang dimana mereka semakin mantap dengan segala ide-ide tentang organisasi yang berdasarkan solidaritas islam. Pada tahun 1968 Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk

---

<sup>2</sup>[http://www.oic-oci.org/page/?p\\_id=52&p\\_ref=26&lan=en](http://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en) diakses tanggal 17 April 2018

<sup>3</sup>Lihat dilaman <https://id.scribd.com/doc/28694673/OIC-OKI-Organisasi-Konfrensi-Islam> (ebook) diakses pada tanggal 16 april 2018

suatu Organisasi Islam Internasional. Selang 1 Tahun kunjungan Raja Faisal yakni tepatnya pada tahun 1969 tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Masjid AL-Aqsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel. Sehingga tanggal 22-25 September 1969 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Islam di Rabat, Maroko untuk membicarakan pembebasan kota Jerussalem dan Masjid Al-Aqsha dari cengkraman Israel. Pada awalnya, tujuan dari pertemuan ini hanya untuk membahas insiden pembakaran terhadap Al-Aqsa. Namun pada akhirnya, setelah perdebatan panjang para peserta rapat lalu membahas isu yang lebih luas. Pertemuan tersebut lalu dianggap sebagai awal dari pembentukan Organisasi Kerja Sama Islam yang mana pada saat pembentukannya masih bernama Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Kesekretariatan permanen OKI berada di Jeddah, Arab Saudi.<sup>4</sup> OKI dianggap sebagai organisasi antar pemerintah terbesar kedua setelah PBB dan juga merupakan organisasi terbesar yang berhubungan dengan agama.<sup>5</sup> Semenjak 1 Januari 2014, Sekretaris Jenderal

---

<sup>4</sup> Informasi lihat di laman The Organization of Islamic Cooperation, "History," OIC-OCI.org, [http://www.oicoci.org/oicv2/page/?p\\_id=52&p\\_ref=26&lan=en](http://www.oicoci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en) diakses pada 14 Oktober 2017 pukul 22:02 WIB

<sup>5</sup> Ciljar Harders dan Metteo Legrenzi, 2008 "*Regionalism? Regional Cooperation, Regionalism and Regionalization in the Middle East*", Surrey: Ashgate. hlm. 26

OKI di jabat oleh H.E. Mr. Iyad Ameen Madani dari Arab Saudi menggantikan Ekmeleddin Ihsanoglu dari Turki.<sup>6</sup>

Negara-negara yang menjadi anggota OKI adalah negara-negara dengan latar perekonomian yang beragam. Namun, yang menjadi penopang utama kekuatan ekonomi terbesar OKI adalah negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia yang tergabung di dalam Organisasi itu sendiri, serta beberapa negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar negara Timur Tengah mengemban peranan besar dalam jalannya OKI. Namun, OKI juga terdiri atas negara inti yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam organisasi dan negara anggota lainnya yang memiliki peran pengikut. Oleh sebab itu, OKI juga terdiri dari beberapa kelompok elite kekuasaan dan beberapa negara yang kurang memiliki pengaruh dalam organisasi dalam mengambil keputusan penting. Namun terlepas dari ini, OKI dianggap relatif penting untuk anggotanya. Sebab, OKI adalah satu-satunya organisasi yang dapat menyatukan semua negara-negara-negara Islam dibawah satu atap.<sup>7</sup>

Di samping diperkuat dengan anggotanya, OKI juga didukung dengan beberapa entitas pengamat yang berasal dari berbagai latar belakang. Saat ini ada lima

---

<sup>6</sup> The Organization of Islamic Cooperation, "Biography: Secretary General of OIC, H.E. Mr. Iyad Ameen Madani," OIC-OCI.org,[http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p\\_id=58](http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=58) diakses pada 14 Oktober 2017 pukul 22:02 WIB

<sup>7</sup>Lihat dilaman The Organization of Islamic Cooperation, "Home," OIC-OCI.org,[http://www.oicoci.org/page\\_detail.asp?p\\_id=52](http://www.oicoci.org/page_detail.asp?p_id=52) (diakses pada 14 Oktober 2017 pukul 22:02 WIB)

negara yang menjadi pengamat di OKI yaitu: 1). Bosnia dan Herzegovina (1994), 2). Republik Afrika Tengah (1996), 3). Kerajaan Thailand (1998), 4). Federasi Rusia (2005), 5). Negara Siprus Turki (1979). Ada juga satu organisasi komunitas Muslim yang menjadi pengamat yaitu *Moro National Liberation Front* (MNLF) dari Filipina (1977). Dua institusi Islam juga tercatat sebagai pengamat yaitu: *Parliamentary Union of The OIC Member State* (PUOICM) dan *Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation* (ICYPDC). Di luar itu, organisasi internasional lainnya yang menjadi pengamat adalah: Perserikatan Bangsa-Bangsa (1976), Gerakan Non-Blok (1977), Liga Arab (1975), Uni Afrika (1977), dan Organisasi Kerjasama Ekonomi (1995).<sup>8</sup>

Sebagai organisasi internasional OKI tidak hanya membangun hubungan antar anggota dan dengan kelompok pengamat, OKI juga menjalin berbagai kerja sama dengan lembaga lainnya, di antaranya: Komite Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan (COMEC), Kantor Berita Islam Internasional (IINA), Bank Pembangunan Islam (IDB) dan Dana Solidaritas Islam (ISF).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> The Organization of Islamic Cooperation, "About OIC," OICUN.org, <http://www.oicun.org/2/23/> (diakses pada 14 Oktober 2017 pukul 22:02 WIB)

<sup>9</sup> Shahram Akbarzadeh dan Samina Yasmeen, 2005. *"Islam and the West: Reflection from Australia"*. New South Wales: University of New South Wales Press.

## **B. Tujuan dan Prinsip Organisasi Kerjasama Islam**

Segala hal yang berkaitan dengan OKI diatur dalam Piagam OKI. Piagam OKI merupakan dokumen legal tertinggi. Piagam tersebut dirumuskan dalam dua pertemuan besar di masa-masa awal yaitu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri para raja, kepala negara, dan kepala pemerintahan negara-negara Arab di Rabat, Maroko tahun 1969 serta Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-III pada bulan Februari 1972 di Jeddah, Arab Saudi. Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan Februari 1972 telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu : <sup>10</sup>

1. Memperkuat/memperkokoh solidaritas diantara negara anggota yaitu Kerja sama bidang politik, sosial, budaya dan iptek, Perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya.
2. Aksi bersama untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam; Memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.
3. Bekerjasama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan; Menciptakan suasana

---

<sup>10</sup> Informasi lihat dilaman

<http://thesis.ums.ac.id/datapublik/t51836.pdf> diakses pada 13 Oktober 2017 pukul 22:28 WIB

yang menguntungkan dan saling pengertian diantara negara anggota dan negara-negara lain.

Pada KTT Islam ke-XI di Dakar, Senegal, yang diselenggarakan pada tanggal 13–14 Maret 2008, OKI mengamandemen piagam mereka seiring dengan perkembangan zaman dan isu yang berkembang di abad kedua puluh satu. Dalam pembukaan piagam yang baru ini dinyatakan nilai-nilai yang mendasari OKI seperti persatuan dan persaudaraan umat Islam, perdamaian dan keamanan internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap muslim minoritas.<sup>11</sup> Piagam tersebut juga menyatakan bahwa OKI mengamanatkan Sekretariat Jenderal untuk menjamin hak-hak muslim minoritas dan masyarakat negara nonanggota. Dalam misinya OKI menjaga kelompok minoritas dan komunitas muslim di negara non-anggota dan melakukan intervensi atas nama perlindungan hak asasi manusia yang berkonsentrasi pada agama sebagai elemen penting yang mengikat muslim secara bersama.<sup>12</sup>

Sementara itu dari segi tujuan organisasi, amandemen Piagam OKI juga memperbaharui tujuan organisasi. Di sana tampak jelas bahwa meskipun nama dan fungsinya berorientasi pada agama, tujuan-tujuan OKI yang tertera di dalam piagamnya justru didasarkan

---

<sup>11</sup> The Organisation of the Islamic Cooperation, *Charter of the Organisation of the Islamic Conference 1972*, Preamble

<sup>12</sup> Kementerian Luar Negeri, “Organisasi Kerjasama Islam (OKI),” Kemlu.go.id, [http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=Multilateral Cooperation&IDP=4&P=Multilateral&l=id](http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=Multilateral%20Cooperation&IDP=4&P=Multilateral&l=id), diakses pada 15 Oktober 2017 pukul 17:43 WIB

pada konsep negara modern yang berdaulat. Hal tersebut tertuang jelas dalam pasal 1 Piagam OKI tahun 2008, Yakni:<sup>13</sup>

- a. Mempromosikan hubungan antar negara berdasarkan keadilan, saling menghormati dan bertetangga yang baik untuk memastikan perdamaian global, keamanan, dan harmoni.
- b. Menegaskan kembali dukungan bagi hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan Hukum Internasional.
- c. Mendukung dan memberdayakan rakyat Palestina untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan membangun negara yang berdaulat dengan al-Quds al-Sharif (Yerusalem) sebagai ibukotanya.
- d. Melindungi dan membela citra Islam yang sebenarnya, untuk memerangi pencemaran nama baik Islam dan mendorong dialog antar peradaban dan agama.
- e. Memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, remaja, orang tua dan orang-orang dengan kebutuhan khusus serta pelestarian nilai-nilai keluarga Islam.

---

<sup>13</sup> The Organization of Islamic Cooperation, "Home." Dikutip dari Skripsi Yurisa Irawan. 2016. "*Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam dalam Konflik Thailand Selatan*". Universitas Andalas : Padang hlm 77 informasi lihat di laman (<http://scholar.unand.ac.id/8501/5/Skripsi%20Yurisa%20Irawan.pdf>) diakses pada 2 Maret 2018 pukul 13:15 WIB



- f. Menekankan, melindungi dan mempromosikan peran keluarga sebagai unit alami dan mendasar dalam masyarakat.
- g. Perlindungan hak-hak, martabat dan identitas agama dan budaya masyarakat Muslim dan minoritas di negara non-anggota; mempromosikan dan membela posisi bersatu pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di forum internasional.
- h. Bekerjasama dalam memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, korupsi, pencucian uang dan perdagangan manusia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara anggota harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip OKI berikut.<sup>14</sup>

1. Negara anggota berdaulat, mandiri dan setara dalam hak dan kewajiban.
2. Semua negara anggota wajib menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara damai dan menahan diri dari penggunaan ancaman kekuatan dalam hubungan mereka.
3. Semua negara anggota harus berusaha untuk menghormati kedaulatan nasional, kemandirian dan keutuhan wilayah negara anggota lainnya dan harus menahan diri dari campuran tangan dalam urusan internal orang lain.
4. Negara anggota wajib menegakkan dan mempromosikan pada tingkat nasional dan

---

<sup>14</sup> The Organization of Islamic Cooperation, "About OIC." Di dalam, *Ibid.*, hlm. 79

internasional, pemerintahan yang baik, demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan aturan hukum. Berdasarkan uraian di atas, OKI mengonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas diantara negara anggota, dan OKI juga menekankan pentingnya untuk menjadi organisasi yang baik dari masyarakat dunia dan menghormati kedaulatan, integritas dan martabat negara.

### **C. Struktur OKI**

OKI memiliki beberapa struktur organisasi yang memiliki fungsinya masing-masing. Di dalam OKI struktur organisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Badan-Badan Utama, Komite Khusus, Badan Subsider, Lembaga yang bersifat Otonom.<sup>15</sup>

#### **a. Badan-Badan Utama dalam OKI**

##### **1. Konferensi Para Raja atau Kepala Negara/Pemerintah (*The Conference of King of State and Government*)**

Konferensi ini merupakan badan tertinggi dalam OKI karena pembahasan yang dilakukan langsung oleh Para Raja dan Kepala Negara. Awalnya badan ini hanya melakukan sidang jika membahas sesuatu yang berkaitan dengan dunia Islam, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Lalu pada KTT III di Mekah (Januari 1981), diputuskan bahwa KTT diadakan 3 tahun sekali untuk

---

<sup>15</sup> Organization Of Islamic Cooperation, Organization Structure Of the OIC, 2012. Tersedia dari [http://www.oic.un.org/oic\\_organ\\_links.asp](http://www.oic.un.org/oic_organ_links.asp) diakses pada 15 Oktober 2017 pukul 18:20 WIB

menetapkan kebijakan- kebijakan yang diambil OKI dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada.

## **2. Konferensi Para Menteri Luar Negeri (*The Islamic Conference of Ministers of Foreign Affairs*)**

Konferensi Para Menteri Luar Negeri (KTM) , tertera dalam artikel V Piagam OKI diadakan setahun sekali. Pertemuan ini bertujuan untuk memeriksa dan menguji hasil-hasil yang telah dicapai dari implementasi atas kebijakan-kebijakan yang di ambil dari KTT sebelumnya.

KTM sebenarnya tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, jika ada hal yang mendesak yang dianggap penting, maka KTM Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan satu atau beberapa negara anggota ataupun diminta oleh Sekretaris Jendral dengan persetujuan mayoritas dua per tiga negara anggota. KTM juga memiliki hak untuk dilakukannya sidang KTT. Selain itu, yang menjadi agenda rutin dari Para Menteri Luar Negeri OKI adalah mengadakan Sidang Konsultasi Tingkat Menteri di PBB yang bertempat di New York, dalam rangka Sidang Umum PBB.

## **3. Sekretariat Jendral (*The General Secretariat*)**

Sekretariat Jendral adalah badan eksekutif OKI yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) dengan empat orang Asisten Sekjen. Pertama kali didirikan pada KTM di Jeddah, Saudi Arabia (Februari 1970). Sekjen dipilih oleh Dewan Menteri Luar Negeri selama 5 tahun sekali, dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali setelah masa jabatannya habis. Sekjen memiliki tugas utama sebagai orang yang dipercaya untuk menjalankan

implementasi atas keputusan yang dikeluarkan pada KTT dan KTM. Markas besar Sekretariat Jendral OKI bertempat di Jeddah, Saudi Arabia. Adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Membawa perhatian besar pada kecakapan (profesionalisme) berbagai hal yang berkaitan dengan OKI, dalam opini, melayani atau mengurangi tujuan-tujuan organisasi.
- 2) Menindaklanjuti keputusan implementasi, resolusi, dan rekomendasi KTT Islam dan dewan menteri luar negeri dan pertemuan kementerian lainnya.
- 3) Menyediakan negara-negara anggota dengan kertas kerja dan memoranda, dalam implementasi keputusan, resolusi, dan rekomendasi dari KTT dan dewan Menteri Luar Negeri.
- 4) Mengkoordinasikan dan mengharmonisasi pekerjaan pada bagian-bagian yang relevan yang ada pada organisasi.
- 5) Mempersiapkan program dan anggaran Sekretariat Jendral.
- 6) Menyalurkan komunikasi antara negara-negara dan memfasilitasi konsultasi dan pertukaran pandangan penyebaran informasi.
- 7) Melakukan sebagaimana fungsi lainnya yang dipercaya kepada Sekretariat Jendral oleh KTT atau dewan Menteri Luar Negeri.

---

<sup>16</sup> Organization Of Islamic Cooperation, Organization of Structure Of OIC , 2011. Lihat dilaman [http://www.oic.oci.org.page/detail\\_asp?id=38](http://www.oic.oci.org.page/detail_asp?id=38) diakses pada 15 Oktober 2017 pukul 18:25 WIB

- 8) Mengumpulkan laporan tahunan pada dewan Menteri Luar Negeri pada fungsi/kerja organisasi.

#### **4. Mahkamah Islam Internasional (*The International Islamic Court of Justice*)**

Mahkamah Islam Internasional ini memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggotanya secara damai. Mahkamah ini lahir setelah diadakannya KTT III di Mekah, dan bertempat di Kuwait sesuai dengan putusan KTT XIII di Niamey.

##### **b. Komite Tetap**

- **Al Quds Committee**

Didirikan berdasarkan pada Resolusi 1/6P yang diadopsi dari KTT Jeddah pada tanggal 12-15 Juli 1975. Yang memiliki tujuan:

- a) Untuk menindaklanjuti implementasi resolusi-resolusi dari Konferensi Islam dan organisasi internasional lainnya yang mendukung atau sejalan dengan OKI.
- b) Mengimplementasikan seluruh resolusi konflik Arab-Israel pada relasi penting akan Al Quds dan Konflik.

Para komite melakukan pertemuan berdasarkan pada undangan dari ketua komite ini. Untuk segala sesuatu yang diperlukan dalam agenda pertemuan ini, Sekretariat Jendral lah yang memfasilitasinya.

- **Agen Bayt Mal Al Quds**

Agen ini didirikan berdasarkan inisiatif dari Raja Hasan II, Raja Maroko pada Komite Al Quds saat sesi ke 15 di Ifrane, Maroko tahun 1995. Agen ini memiliki afiliasi dengan Komite Al Quds. Agen ini secara legal berdiri pada 30 Juli 1998.

Agen ini melaksanakan pertemuan pertamanya pada 14 Februari 2000 dibawah wewenang tinggi Raja Muhammad VI, Raja Maroko, ketua komite Al Quds dan Sekretariat Jendral OKI. Adapun tujuan-tujuan berdirinya agen ini sebagai berikut:

- 1) Menyelamatkan situs-situs penting di kota Al Quds Al Syarif (Jerusalem).
- 2) Memperpanjang bantuan untuk penduduk Palestina dan institusinya di Kota Suci tersebut.
- 3) Memulihkan dan melindungi mesjid Al Aqsa dan situs-situs suci lainnya di Palestina, baik berupa situs budaya, agama, dan warisan arsitektur kuno.

- **Komite Tetap Masalah-Masalah Informasi dan Kebudayaan (*Standing Committee for Information and Cultural Affairs, COMIAC*)**

Komite ini bertugas dalam menyebarkan informasi-informasi mengenai kemuliaan Islam ke publik internasional, khususnya mengenai Palestina dan Al Quds Al Sharif. Komite ini juga berfokus dalam menghadapi kampanye negatif mengenai agama Islam dan kaum muslimin. Komite ini bermarkas di Dakar, Senegal dan beranggotakan seluruh negara-negara anggota OKI.

- **Komite Tetap untuk Ekonomi dan Kerjasama Perdagangan (*The Standing Committee for***

### ***Economic and Commercial Cooperation, COMCEC)***

Komite ini lahir berdasarkan KTT III di Mekah Al-Mukarramah dan Kerajaan Taif Saudi Arabia pada Januari 1981. Komite memiliki fungsi untuk menindaklanjuti resolusi dibidang ekonomi dan perdagangan, melihat peluang dengan penguat kerjasama diantara negara-negara anggota, dan mempersiapkan program-program dan proposal-proposal yang mampu meningkatkan kapasitas pada bidang ekonomi dan kerjasama perdagangan ini. Keanggotaan komite ini melingkupi seluruh negara-negara anggota OKI.

- **Komite Tetap mengenai Pengetahuan dan Teknologi (*The Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation, COMSTECH*)**

Komite ini lahir berdasarkan KTT III di Mekah Al-Mukarramah dan Kerajaan Taif Saudi Arabia pada Januari 1981. Komite ini berfungsi untuk menindaklanjuti permasalahan dalam bidang pengetahuan dan teknologi (Saintek). Mempelajari peluang dibidang Saintek ini dan melakukan penguatan kerjasama dengan negara-negara anggota dan mempersiapkan program-program agar meningkatkan kapasitas bidang Saintek ini.

### **c. Badan-Badan Subsider**

Badan-badan Subsider itu adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. *Statistical, Economic, Social Reseach and Training Center for Countries (SESRIC)*, sebagai pusat latihan dan riset statistik,

---

<sup>17</sup> Organization Of Islamic Cooperation, Subsidiary Organ, 2011 dilaman <http://www.oic.oci.org/page/detail.asp?id=64> diakses pada 15 Oktober 2017 pukul 18:28 WIB

ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Bertempat di Ankara, Turki.

2. *Research Center for Islamic History, Art and Culture*. Salah satu tujuannya adalah melaksanakan pertemuan para ilmuwan, peneliti, seniman, institusi, organisasi, dan kelompok lainnya baik di dalam dan di luar dari negara anggota yang mana sepakat dengan penelitian dan objek kajian terhadap aspek peradaban Islam. Bertempat di Istanbul, Turki.
3. *Islamic University of Technology (IUT)*, badan ini memiliki tujuan membantu perkembangan SDM pada negara-negara anggota OKI di bidang teknik, teknologi, dan pendidikan kejuruan. Bertempat di Bangladesh.
4. *Islamic Center for Development of Trade (ICDT)*, tujuannya yaitu mempromosikan pertukaran perdagangan diantara negara-negara anggota. Bertempat di Maroko.
5. *International Islamic Fiqh Academy (IIFA)*, bertujuan secara teoritis maupun praktik dalam mencapai kesatuan umat Islam dengan kerja keras untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam lingkup individu, sosial, dan juga internasional. Juga untuk menguatkan jaringan komunitas muslim dengan kepercayaannya terhadap Islam. Bermarkas di Jeddah, Arab Saudi.
6. *Islamic Solidarity Fund and its Waqf (ISF)*, bertujuan untuk langkah-langkah yang memungkinkan dalam meningkatkan



intelektualitas dan moral umat muslim di dunia. Selain itu juga menyediakan alat-alat ataupun bahan kebutuhan dalam kasus bencana alam atau kasus yang disebabkan oleh manusia yang menimpa negara-negara Islam. Bermarkas di Jeddah, Arab Saudi.

**d. Lembaga yang Bersifat Otonom**

Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah Bank Pembangunan Islam di Jeddah, Kantor Berita Islam Internasional di Jeddah, dan Organisasi Penyiaran Islam di Jeddah.

**D. CAPAIAN YANG DI RAIH OKI**

Menjadi organisasi yang menjadi representatif umat islam OKI bertanggung jawab juga akan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat muslim, dan selama ini OKI juga sudah ikut bertanggung jawab dan turut serta mengupayakan kebaikan umat-umat muslim. Contohnya di masalah thailand selatan. Konflik Muslim-Melayu inilah yang akan menjadi subjek utama dalam konflik Thailand Selatan. Konflik tersebut berkaitan dengan persengketaan wilayah dengan perbedaan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Secara sosiologis-kultural masyarakat Muslim Melayu di Thailand selatan merupakan kelompok minoritas yang berbeda dengan kelompok Thai pada umumnya

Secara historis, akar konflik dimulai ketika Kesultanan Pattani dijadikan wilayah Kerajaan Siam melalui Traktat Anglo-Siam tahun 1902. Perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama masyarakat yang berbeda ini menjadi alasan konflik hingga saat ini. Melihat kejadian tahun 2004 di Thailand Selatan yang banyak menelan korban jiwa dengan daya rusak yang masif, OKI sebagai organisasi internasional yang mewadahi negara-negara Islam yang juga berfokus kepada permasalahan minoritas Muslim di wilayah non-anggota menaruh perhatian lebih kepada konflik tersebut. Keterlibatan awal OKI di Thailand Selatan dimulai pada tahun 2005, dimana OKI pertama kali mengancam tindak kekerasan yang diderita oleh masyarakat Muslim Melayu di Thailand Selatan. Disini, OKI hadir sebagai pihak yang melaksanakan resolusi konflik.

Dilihat dengan menggunakan Model Hourglass, strategi resolusi konflik yang dilakukan OKI di Thailand Selatan adalah: 1) *conflict transformation*, 2) *conflict settlement*, dan 3) *conflict containment*. Tujuannya adalah mencegah agar konflik kekerasan tidak terulang kembali (*preventing violent conflict*) baik itu mencegah secara mendalam (*deep prevention*) maupun secara ringan (*light prevention*).

Tidak hanya dalam konflik di Thailand Selatan namun OKI juga mengupayakan perdamaian di Myanmar. Konflik Etnis yang terjadi di Myanmar antara Muslim Rohingya dan Budha Rakhine sudah terjadi sebelum kemerdekaan Myanmar dan sampai saat ini konflik kedua etnis ini belum ada penyelesaiannya, hak Muslim Rohingya juga terabaikan dan tidak mendapat apresiasi

yang berarti dari pemerintah Myanmar sehingga Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang merupakan badan Organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi aspirasi umat muslim yang ada diseluruh dunia mengambil posisi dalam peran sebagai mediator dalam memberikan resolusi bagi perdamaian kedua belah pihak dan mengupayakan perdamaian yang bersifat semu kearah yang lebih baik.

Upaya OKI dalam melakukan ekspansi bagi perdamaian antar kaum minoritas Muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar, dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil. OKI mengalami kendala yang ditunjukkan dengan demo besar-besaran di Myanmar dan pemerintah Myanmar seolah bersikap konservatif serta menolak jalinan konsolidasi atau perdamaian kedua belah pihak (Rohingya dan Rakhine).

Dengan hal tersebut diatas dan sikap pemerintah, maka pergerakan OKI menjadi tidak leluasa dan sempit untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. Di satu sisi masa transisi pemerintah Junta ke Demokrasi mengisahkan banyak catatan sejarah yang perlu dibenahi. Warga pribumi Myanmar sendiri mengalami kekerasan dari pemerintah Junta Militer. Myanmar mengalami masa terberat selama pemerintahan Junta dan menyimpan banyak persoalan serius. Myanmar menutup diri dari akses dunia luar selama pemerintahan

Kesepakatan demi kesepakatan dan pertemuan yang dilakukan oleh OKI dan Myanmar serta melibatkan

PBB sebagai mediator, dapat dikatakan statis akan pencapaian perdamaian. Dinamika politik di Myanmar sendiri masih mengalami pergolakan dan ketidak stabilan lingkungan internal yang mengakibatkan konflik sehingga belum begitu tampak upaya *peace making dan peace building* yang dilakukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Myanmar sedikit pesimis untuk menerima bantuan yang diberikan oleh OKI bagi rekonstruksi pasca konflik, karena dugaan intervensi OKI secara bebas di Myanmar. Myanmar menghendaki penyelesaian masalah internal tanpa adanya pengaruh pihak luar. OKI pada pertemuan skala internasional memberikan bantuan dana yang digalang dari negara- negara anggota OKI bagi Rohingya maupun Budha Rakhine namun belum dipergunakan sebagaimana mestinya. Rekonstruksi akan terlihat sia-sia karena konflik yang terus menguat sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur di Myanmar.

OKI telah melakukan upaya yang signifikan dan menghormati nilai-nilai hukum internasional. OKI menunjukkan otoritas dan keberadaannya sebagai Organisasi Islam Dunia yang memberikan perhatian bagi perjuangan penindasan kaum muslim yang tertindas namun juga atas dasar kemanusiaan. OKI bahkan mendesak PBB dan organisasi kemanusiaan internasional lainnya untuk terlibat secara efektif. OKI mengadakan pertemuan juga dengan PBB dan memantau perkembangan konflik terus-menerus. OKI

telah berusaha dan berupaya bagi penegakan perdamaian di Myanmar meski penolakan dari pemerintah dan warga masyarakat Myanmar. keterlibatan pihak internasional harus tanggap dalam memberikan solusi bagi jutaan jiwa yang terancam akan kemelaratan dan kematian. Baiknya menjadi pijakan untuk memberikan sebuah wilayah kedaulatan sendiri bagi Rohingya agar dapat melangsungkan hidup negara tanpa intervensi dan pertikaian dengan warga negara lainnya. Dengan melihat bahwa penolakan demi penolakan dari negara-negara di dunia untuk menerima Rohingya sebagai warga imigran. Menjadi acuan bagi dunia internasional untuk bergerak lebih netral demi kepentingan hak asasi manusia. Demikian mengenai sebab akibat konflik Rohingya dan Rakhine hingga kepada upaya-upaya pendekatan perdamaian yang dilakukan oleh OKI sebagai pihak mediator.